# BAB II

# KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA - UNICEF

Pada bab sebelumnya, penulis telah menjelaskan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang akan digunakan sebagai metode dalam skripsi ini. Dan dalam bab ini, penulis akan memulai mulai membahas mengenai objek-objek dalam skripsi ini, seperti penjelasan mengenai UNICEF, Tujuan, Fungsi, Tugas UNICEF, Struktur organisasi UNICEF, Sumber pendanaan UNICEF, Hubungan UNICEF dengan mitra kerjanya, serta Program UNICEF.

## UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund)*

Sidang umum PBB dengan keputusan bulat pada tanggal 11 Desember 1946 memutuskan berdirinya UNICEF yang saat itu dinamakan *United Nations International Children's Emergency Fund* (Dana Darurat Anak Internasional PBB) dan dibentuk berdasarkan keprihatinan terhadap kondisi anak-anak pada masa itu dan hendak memberikan perlindungan bagi anak-anak serta kaum muda adalah bagian dari suatu pola hubungan kerjasama yang menyatakan berbagai lembaga pembangunan PBB, dan badan-badan pemberi bantuan bilateral dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. [[1]](#footnote-1)

Pada awal-awal tahun, sumber dana UNICEF digunakan untuk kebutuhan darurat untuk anak-anak di Eropa dan Cina pasca perang untuk pengadaan pangan, obat-obatan dan sandang atau pakaian. Pada bulan Desember tahun 1950, sidang umum mengubah mandat UNICEF untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang tidak diungkapkan tapi sangat mendesak dari sekian banyak anak yang tidak terhitung jumlahnya di negara berkembang. Pada bulan Oktober 1953, sidang umum memutuskan bahwa UNICEF harus meneruskan tugasnya sebagai badan tetap PBB. Dengan menyisihkan perbedaan antara kemanusiaan dan tujuan pembangunan, UNICEF mulai menjangkau negara terbelakang dalam proyek terutama dengan cara saling terkait, menyangkut gizi, pelayanan kesehatan primer dan pendidikan dasar bagi ibu dan anak, yang melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat. Pada tahun 1969, UNICEF mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian yang merupakan pengakuan bahwa kesejahteraan anak saat ini tidak terpisahkan dari perdamaian dunia kedepannya. Mandat UNICEF menginginkan perencanaan program bergeser sampai keluar proyek-proyek sektoral. Mengaitkan proses sosial dengan pengembangan umat manusia. UNICEF menanggapi kebutuhan strategis ini yaitu, pertama-tama dengan perencanaan program-program di suatu negara *(Country Programming)* dan kemudian dengan pendekatan pelayanan untuk masyarakat.[[2]](#footnote-2)

Prinsip-prinsip strategi pelayanan untuk masyarakat dinyatakan dalam proyek-proyek kerjasama dengan UNICEF, dan lebih mendalam konsep pelayanan kesehatan dasar tersebut dipromosikan bersama oleh WHO. Sidang umum yang diselenggarakan pada tahun 1979 memproklamasikan bahwa pada tahun 1979, merupakan Tahun Internasional Anak (IYC) dan menjadikan UNICEF sebagai badan utama PBB untuk mengkoordinasikan dukungan untuk setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang sebagian besar dilaksanakan pada tingkat nasional. Pada akhir tahun, Sidang Umum memberikan UNICEF tanggung jawab untuk menarik perhatian dunia dengan kebutuhan dan masalah umum yang dihadapi anak-anak baik di negara industri maupun di negara berkembang. UNICEF berbeda dengan Organisasi Internasional lainnya, karena dalam melaksanakan mandatnya, UNICEF hanya bergantung pada dana sukarela. UNICEF bukan saja mengusahakan dukungan dari Pemerintah maupun masyarakat untuk program kerjasama, tetapi juga mencoba mendorong kesadaran masyarakat umum bahwa kebutuhan anak sangatlah penting, serta sarana untuk memenuhinya yaitu melalui dukungan *(advocacy)* dengan Pemerintah, pimpinan masyarakat, para pendidik dan para ahli lainnya, kelompok kebudayaan, serta media maupun masyarakat setempat. Untuk itu UNICEF sangat menghargai kemitraannya dengan komite-komite Nasional serta hubungan kerjasama dengan Lembaga-Lembaga swadaya masyarakat di negara-negara berkembang. [[3]](#footnote-3)

Sebagai bagian integral dari PBB, UNICEF merupakan semi otonom yang memiliki badan pengatur sendiri, yaitu Dewan Eksekutif dan sekretariat. Dewan terdiri dari 41 anggota, yang dipilih Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) berdasarkan rotasi tahunan untuk masa tiga tahun dengan memperhatikan pembagian geografis dan perwakilan negara-negara penyumbang dan penerima utama. Dewan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan UNICEF meninjau program-program serta menyetujui pengeluaran-pengeluaran untuk kerjasama UNICEF di negara-negara berkembang dan untuk biaya operasi. Tetapi dalam sidang-sidang luar biasa, Dewan bertemu selama dua minggu setiap tahunnya, Dewan Eksekutif yang bertanggung jawab atas administrasi UNICEF diangkat oleh Sekretaris Jendral PBB setelah berkonsultasi dengan Dewan, dan kantor-kantor perwakilan UNICEF merupakan unit-unit operasi kunci untuk memberi dukungan, pemberian nasihat, pemberian program serta logistik. Di bawah tanggung jawab menyeluruh dari Kepala Perwakilan UNICEF untuk negara yang bersangkutan, para pengelola program juga membantu departemen-departemen dan lembaga-lembaga yang terikat untuk mempersiapkan, serta melaksanakan dan mengevaluasi program kerjasama yang telah dilakukan dengan UNICEF. Fungsi kantor UNICEF di New York, Jenewa, Kopenhagen, Tokyo, dan Sydney adalah untuk melayani Dewan Eksekutif, serta mengembangkan dan mengarahkan kebijaksanaan, mengelola sumber keuangan, personalia dan informasi, kegiatan pemeriksaan keuangan, penyebarluasan informasi, dan menumpuk hubungan dengan pemerintah donor dan komite-komie Nasional untuk UNICEF.[[4]](#footnote-4)

Dalam hal ini, UNICEF menjadi salah satu dari beberapa Organisasi Internasional di dunia yang memiliki tujuan mulia dalam menciptakan lingkungan nyaman serta layak bagi anak-anak yang ada di seluruh dunia. UNICEF adalah kekuatan pendorong yang membantu membangun dunia, di mana hak-hak setiap anak terealisasikan.

## Tujuan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi, dan Sumber Pendanaan UNICEF dalam Perlindungan Anak

### Tujuan *United Nations International Children’s Emergency Fund* (UNICEF)

### Tujuan utama UNICEF adalah membantu anak-anak serta kaum perempuan di seluruh dunia yang paling membutuhkan pertolongan dalam krisis kemanusiaan. Dengan mencermati program-program UNICEF di berbagai negara, tujuan UNICEF adalah untuk mempromosikan kesetaraan hak-hak perempuan dan untuk mendukung mereka untuk berpartisipasi penuh dalam bidang politik, pembangunan serta dalam masyarakat tempat mereka tinggal.

UNICEF memobilisasikan kepentingan politik dan sumber daya material untuk membantu negara-negara seperti halnya pembangunan negara, memastikan panggilan pertama untuk anak-anak, dan membangun kemampuan mereka ke dalam kebijakan yang pantas dan memberikan pelayanan untuk anak-anak serta keluarga mereka. UNICEF bekerja untuk memastikan bahwa anak-anak di seluruh dunia memiliki akses pendidikan dan perawatan kesehatan yang dapat dilindungi serta ekspoitasi, pengabaian dan pelecehan.

### Fungsi *United Nations International Children’s Emergency Fund* (UNICEF)

Peranan UNICEF dalam ruang lingkup global ditegaskan oleh fungsi dan tugas UNICEF dalam memberikan advokasi kepada anak-anak. Fungsi UNICEF mengarah pada kegunaannya sebagai suatu organisasi internasional tanpa terikat dalam kurun waktu tertentu.

Sebagai organisasi yang memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak, UNICEF memiliki beberapa fungsi, yaitu [[5]](#footnote-5)

1. Memberi arah serta alternatif pemecahan bagi negara-negara yang menghadapai masalah tentang anak.
2. Memberi nasehat serta bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak.
3. Mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial UNICEF di seluruh Negara.
4. Mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melakukan metode yang lebih baik.
5. Mengkoordinasi proyek-proyek yang lebih luas.
6. Bekerjasama dengan partner Internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan.

Berdasarkan *World Declaration on the survival, protection, and Development of Children* di New York pada 30 September 1990, maka UNICEF sebagai organisasi Internasional yang memiliki kredibilitas Internasional yang dianggap sebagai ujung tombak dalam menjalankan tugas yang tercantum dalam amanat deklarasi tersebut, yaitu sebagai berikut :[[6]](#footnote-6)

1. Peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak merupakan tugas yang paling utama dan wajib menentukan daerah atau wilayah untuk jangkauan program yang bersangkutan.
2. Perhatian, pelayanan, serta dukungan yang lebih mendalam pada anak-anak yang menderita dan berada di lingkungan yang buruk.
3. Memperjuangkan peranan wanita secara umum dan memastikan bahwa wanita mendapatkan yang sepadan atau hak persamaan, dimana hal tersebut akan berpengaruh positif bagi kehidupan anak-anak. Anak-anak perempuan harus diberikan kesempatan dan perawatan yang sama dari awal keberadaannya.
4. Dalam hal ini, kondisi akhir era 1980an dan awal 1990an, lebih dari 100 juta anak tidak mengenyam pendidikan dasar di sekolah dan dua pertiganya adalah anak perempuan. Ketentuan mengenai pendidikan dasar dan melek huruf *(literacy)* bagi seluruh anak merupakan kontribusi yang sangat penting, yang dapat mendukung upaya pembangunan kehidupan anak-anak.
5. Gerakan keselamatan melahirkan bagi ibu dipromosikan dalam berbagai cara dan media. Penekanan pada program keluarga berencana menyangkut kapasitas keluarga dan jangka waktu yang ideal untuk melahirkan. Keluarga, yang merupakan komunitas kecil yang fundamental dan lingkungan alami bagi perkembangan anak-anak, sebaiknya mendapat perlindungan dan bantuan.
6. Setiap anak-anak harus diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri jati dirinya dan membiarkan mereka yang sehat dan suportif dalam dukungan keluarga dan kepedulian lainnya bagi kesejahteraan mereka. Mereka harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan yang bertanggung jawab dalam masyarakat dan sejak dini mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya serta bermasyarakat.
7. Kondisi ekonomi berhubungan dengan nasib anak-anak. Demi masa depan anak-anak, hal ini merupakan sesuatu yang sangat mendesak untuk memastikan kondisi ekonomi di semua negara dan juga untuk melanjutkan pemberian perhatian penting pada solusi yang luas cakupannya dapat mengikuti perubahan jaman, serta guna menghadapi hutang luar negeri yang dihadapi negara-negara debitur yang sedang berkembang.
8. Amanat ini wajib ditindak lanjuti dan diupayakan dengan persetujuan bersama oleh Negara-Negara di seluruh Dunia, baik upaya nasional maupun upaya-upaya dalam skala Internasional.

### Tugas *United Nations International Children’s Emergency Fund* (UNICEF)

Berdasarkan mandat Majelis Umum PBB, misi UNICEF adalah:[[7]](#footnote-7)

1. UNICEF mengemban mandat Majelis Umum PBB guna mendukung perlindungan hak kebebasan anak, membantu anak-anak dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk mengembangkan bakat.
2. UNICEF bermaksud sejalan dengan *Country Programming*, memprakarsai tuntutan terhadap persamaan hak perempuan serta mendukung penuh mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial maupun pembangunan ekonomi dalam masyarakat.
3. UNICEF berusaha menegakkan hak kebebasan anak yang sesuai dengan azas etika dan tingkah laku yang berlaku universal berdasarkan the *Convention on the Rights of the Children*
4. UNICEF menyatakan bahwa pertahanan, perlindungan, dan pengembangan anak adalah pembangunan universal yang sangat penting sehubungan dengan kemajuan umat manusia.
5. UNICEF menggerakkan kesadaran politik dan sumber materi untuk pengembangan negara (khususnya negara berkembang). Menjamin motto *"First Call for Children"* dan mengembangkan kemampuan anak guna membentuk kebijakan yang tepat dan mempersatukan kembali anak-anak yang terpisah dari keluarganya.
6. UNICEF menjamin perlindungan khusus bagi segala kondisi yang merugikan anak-anak korban perang dan yang mengalami bencana alam, kemelaratan, segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan kecatatan.
7. UNICEF membantu dalam keadaan darurat guna melindungi hak-hak kebebasan anak, serta
8. UNICEF adalah Lembaga Internasional yang menjalin kerjasama tanpa diskriminasi. Maka dari itu, UNICEF memproritaskan perhatiannya pada anak-anak dan negara yang sangat menderita.

### Struktur *Organisasi United Nations International Children’s Emergency* *Fund* (UNICEF)

UNICEF merupakan badan yang berstatus semi otonom dan merupakan bagian internal dari PBB. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, UNICEF memiliki lembaga-lembaga administrasi dan sekretariat. UNICEF didirikan dengan sejumlah kantor pusat di New York, Jenewa, Copenhagen, Sidney, dan Tokyo, serta kantor-kantor lapangan *(Field Offices).* Kantor pusat UNICEF terbagi lagi menjadi berbagai kelompok divisi dan unit-unit, sedangkan struktur lapangan dibagi menjadi wilayah negara, kantor-kantor area, sub-area, dan kantor penghubung. Segala kebijakan atau program-program serta pengelolaan dana untuk proyek dan untuk pekerjaan organisasi ditentukan oleh badan eksekutif. Sedangkan fungsi dari kantor-kantor yang berada di New York, Jenewa, Copanhagen, Tokyo dan Sidney adalah untuk membantu badan-badan eksekutif dalam mengembangkan dan mengarahkan kebijaksanaan mengelola sumber-sumber dalam keuangan atau mengelola operasi, mencari informasi dan mempertahankan hubungan dengan Pemerintah negara-negara pendonor dana.[[8]](#footnote-8)

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi UNICEF** [[9]](#footnote-9)

Terdapat 11 badan dalam tubuh UNICEF yang memiliki tugas dan wewenang masing-masinga, yaitu : [[10]](#footnote-10)

1. Badan Eksekutif

Badan Eksekutif merupakan badan yang tertinggi dalam tubuh UNICEF, yang terdiri dari 36 negara anggota yang dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) untuk jangka waktu 3 tahun. Badan ini mempunyai beberapa wewenang, yaitu :

1. Meninjau pekerjaan dan prospek dari organisasi
2. Menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan
3. Memberi persetujuan pada rencana jangka menengah untuk organisasi
4. Menerima usul-usul dan membuat komitmen untuk program kerjasama dan pembiayaan
5. Mencatat laporan dari auditor eksternal PBB
6. Memberi persetujuan pada orang keuangan
7. Mengatur dan melaksanakan pencarian dan untuk program organisasi
8. Direktur Eksekutif

Direktur Eksekutif berfungsi untuk membantu Badan Eksekutif, Direktur Eksekutif membawahi beberapa organ, yaitu :

1. Kantor Direktur Eksekutif, meliputi Staf Eksekutif, Komite Manajemen, Kantor Sekretaris Badan Eksekutif dan Kantor Pembukaan Internal.
2. Kelompok Hubungan Eksternal, meliputi Kantor Dana Program, Divisi Kantor Dana Program, Divisi Komunikasi dan Informasi, penjualan kartu-kartu ucapan, Kantor urusan non pemerintah.
3. Kelompok program, meliputi Divisi perencanaan pengembangan, Divisi Program Pelayanan Lapangan dan Operasi Darurat.
4. Kelompok Operasi, meliputi Divisi Pengawasan, Divisi Personal, Divisi Supply, dan Divisi Manajemen Pembiayaan.

Dengan adanya kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Badan Eksekutif, maka Direktur Eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan administrasi UNICEF.

1. Kantor Direktur Eksekutif

Kantor Direktur Eksekutif bertugas mengkoordinasikan dan meninjau kebijaksanaan serta kemajuan yang telah dicapai oleh UNICEF, serta menangani masalah-masalah dari kantor lapangan dan divisi-divisi. Kantor ini berusaha menyediakan dana yang berkaitan dengan manajemen, administrasi serta pembiayaan staf UNICEF. Meraka juga mengadakan hubungan dengan para pejabat pemerintah dan badan-badan yang relavan untuk menjalankan suatu kebijaksanaan, usul dan informasi tentang UNICEF. Kantor ini sering juga diartikan sebagai *"Front office"* yang bertanggung jawab untuk keseluruhan tujuan dan aktivitas UNICEF. Pemimpin dari kantor ini adalah wakil-wakil Direktur Eksekutif dan *Executive Secretary*. Kantor Direktur Eksekutif mengorganisir Kantor Sekretariat Badan Eksekutif dan Kantor Pemeriksa Keuangan Internal.

1. Kantor Sekertaris Badan Eksekutif

Kantor Sekretaris Badan Eksekutif mengupayakan adanya suatu hubungan yang efektif serta antara anggota dengan badan-badan PBB lainnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan Badan Eksekutif. Kantor Sekretaris Badan Eksekutif ini mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

1. Berpartisipasi dalam pembuatan kebijaksanaan dan rekomendasi dari Direktur kepala Badan Eksekutif.
2. Mempersiapkan kegiatan rapat
3. Mengorganisir rapat-rapat dan keperluan Badan Eksekutif.
4. Mempersiapkan pelayanan editorial dan teknik untuk laporan-laporan dan pembuatan dokumen lain.
5. Berkonsultasi dengan para pejabat Eksekutif yang mewakili pemerintah dan bekerja bagi UNICEF
6. Mengusahakan rekan yang permanen dari perundingan dan keputusan Badan Eksekutif.
7. Kantor Pemeriksa Keuangan Internal

Kantor ini menyalurkan dan memeriksa penggunaan keuangan UNICEF. Pemeriksaan dilakukan di pusat dan lapangan, dimana mereka meninjau program kerjasama untuk menilai efektifitas dan efisien yang kemudian digunakan sebagai input bagi UNICEF. Hasil pemeriksaan ini dilaporkan langsung kepada Direktur Eksekutif.

1. Kelompok Hubungan Eksternal

Kelompok hubungan eksternal bertugas untuk membantu mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan hubungan eksternal UNICEF, termasuk hubungan dengan pemerintah, *Non Government Organization* (NGO), badan-badan PBB dan masyarakat umum. Dalam kelompok ini terdapat juga kantor dana program yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab, yaitu :

1. Mengkoordinir seluruh kegiatan sekretaris yang berhubungan dengan permohonan bantuan keuangan untuk kegiatan UNICEF yang diperoleh dari pemerintah, PBB dan badan-badan lainnya.
2. Menjamin hubungan erat dengan pemerintah, misi permanen, pengamat dan kantor-kantor lapangan.

Kelompok hubungan eksternal ini berada dibawah koordinasi dari Wakil Direktur Eksekutif, yang turut serta membantu dalam mencari dana. Kelompok hubungan eksternal ini membawahi divisi kartu ucapan, divisi informasi, divisi hubungan luar dan program pembiayaan.

1. Kelompok Program

Kelompok program bertanggung jawab dalam menjalankan kebijaksanaan dan penerapan program-program UNICEF. Kelompok ini berada dibawah koordinasi Wakil Direktur Eksekutif, dan didalamnya terdapat divisi program pengembangan. Adapun tugas dari divisi ini adalah :

1. Mendorong Direktur Eksekutif untuk membuat program-program kebijakan dan untuk mengawasi pelaksanaannya.
2. Mengembangkan garis pedoman dan mengawasi pengawasannya.
3. Memberikan dorongan kepada kantor-kantor lapangan untuk membuat, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program-program negara.
4. Menjamin akuisisi, distribusi dan penyimpanan informasi program yang berhubungan.
5. Menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi teknis lainnya.
6. Menyelesaikan rekomendasi program, meninjau kebijakan, melaporkan dan mencatat informasi sebagai wujud kepatuhan terhadap Dewan Eksekutif.

Divisi ini menjalin kerjasama dengan badan-badan khusus, serta kerjasama dengan badan PBB lainnya, seperti WHO dan UNESCO untuk menjalankan berbagai kegiatan dan berbagi kelompok, seperti kelompok pendukung program gizi, penyediaan obat-obatan, air bersih dan sanitasi, pendidikan, program komunikasi serta unit kesehatan. Kelompok program membawahi Kantor Evaluasi, Divisi Program, dan Kantor Perencanaan.

1. Kelompok Operasional

Kelompok operasional bertanggung jawab kepadal Wakil Direktur Eksekutif bagian operasional. Aktivitas kelompok ini berkaitan dengan sumber daya manusia, manajemen dan administrasi finansial. Tugas-tugasnya antara lain :

1. Memberikan strategi perencanaan sumber dana UNICEF
2. Mendukung kegiatan di lapangan dan pusat dalam hal keuangan
3. Memberikan dukungan pada staf organisasi dalam menjalankan tugasnya
4. Mengadakan latihan-latihan bagi anggota
5. Memberikan informasi dan nasehat bagi mereka yang membutuhkan.

Kelompok ini membawahi Divisi Manajemen Finansial, Divisi Informasi, Divisi *Supply*, Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Manajemen dan Administrasi.

1. Kantor Regional

Kantor regional UNICEF merupakan kunci operasional unit untuk mengajukan usul, nasehat, program-program dan logistik. Tugas tetap dari kantor regional adalah menjadi perantara dan sarana komunikasi antara kantor lapangan dan kantor pusat. Kantor regional bertanggung jawab untuk memilih dan menyebarluaskan informasi keseluruhan wilayah yang memungkinkan untuk menerima pelayanan bantuan yang disesuaikan dengan permintaan dari kantor perwakilan setiap negara.

Kantor regional memfokuskan diri pada sumber-sumber interdisiplin dan profesional yang dapat :

1. Menjalankan pelayanan yang menyeluruh pada kantor-kantor lapangan disetiap wilayah.
2. Memberikan saran-saran pada kantor pusat.
3. Membentuk basis regional untuk mewakili Direktur Eksekutif di luar maupun di dalam UNICEF.

Seorang Direktur Regional betanggung jawab dalam merencanakan bantuan dan persiapan dari program-program di setiap negara yang berada di bawah perwakilannya. Dalam hal ini kantor regional bertanggung jawab menyediakan bantuan kepada kantor-kantor lapangan yang membutuhkan dukungan dalam meningkatkan program-programnya. Dalam hubungan eksternal, Direktur Regional mempunyai tanggung jawab untuk mengamati sebab-sebab diperlukannya pemberian bantuan untuk anak-anak, bagaimana kebijaksanaannya dan strategi pencapaiannya. Direktur Regional juga mewakili Direktur Eksekutif di negara-negara yang secara langsung ditempati oleh kantor regional dan juga institusi-institusi yang mempunyai karakter global.

1. Badan-Badan Pendukung Lainnya

Pendukung-pendukung lainnya dalam kegiatan UNICEF adalah kelompok-kelompok sukarelawan dan komite-komite nasional yang memainkan peranan penting dalam membantu membangkitkan pengertian masyarakat yang lebih baik mengenai anak-anak di negara-negara berkembang. Komite-komite nasional UNICEF ini telah dimiliki oleh 33 negara. Banyak usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan dana sukarela yang diprakarsai oleh komite nasional untuk UNICEF. Hal ini dilakukan baik secara tidak langsung melalui kegiatan promotif dan penyuluhan masyarakat, atau secara langsung melalui penjualan kartu ucapan selamat dan kegiatan-kegiatan pengumpulan dana lainnya.

1. Staf organisai UNICEF

Dalam membedakan anggota staf UNICEF terdapat beberapa kategori, yaitu :

1. Profesional ditingkat internasional dan kategori-kategori tertinggi meliputi Internasional Professionals (P), Directors (D), Assistant Secretaries General (ASG), dan Under Secretaries General (USG)
2. Project personal
3. National Profesional officered (NPO)
4. General Service Staff (GSS)
5. Junior Professional Officers (JPO)
6. Manual Workers (M), (hanya untuk New York)
7. United Nations Volunteers (UNV).

### Sumber Pendanaan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF)

Semua pendapatan UNICEF berasal dari sumbangan sukarela dari pemerintah, badan-badan antar pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan perorangan. Sebagian besar sumbangan adalah untuk sumber umum UNICEF. Pendapatan lain dapat diperuntukkan proyek-proyek tambahan yang disetujui oleh Dewan, atau untuk bantuan darurat dan rehabilitasi. Untuk meningkatkan identifikasi biaya, UNICEF terus meningkatkan prosedur-prosedurnya untuk persiapan proyek-proyek yang dibiayai dengan dana tambahan dan untuk mengadakan pembicaraan dengan donor-donor dan pemerintah-pemerintah yang diberi bantuan.Direktur Eksekutif memberikan otorisasi pengeluaran-pengeluaran untuk memenuhi komitmen-komitmen yang telah disetujui oleh Dewan untuk bantuan program dan untuk anggaran administrasi. Untuk program kerjasama dengan suatu pemerintah, pengeluaran yang telah disetujui tercermin dalam persetujuan-persetujuan berkala antara pemerintah dan UNICEF. [[11]](#footnote-11)

Meski sebagian besar dari pendanaan dibantu oleh pemerintah, UNICEF bukan merupakan organisasi anggota dengan suatu anggaran yang dinilai. Namun demikian, hampir semua negara, Baik negara industri maupun berkembang, memberi sumbangan tahunan, yang secara keseluruhan merupakan kira-kira tiga perempat dari pemasukan UNICEF. Perorangan dan organisasi-organisai di seluruh dunia juga merupakan sumber pendanaan yang penting, dan bagi UNICEF merupakan nilai yang jauh lebih besar dari jumlah sumbangan yang mereka berikan. Sebagai tangan PBB, untuk kepentingan rakyat, UNICEF menikmati hubungan yang khas dengan organisasi-organisasi swasta dan masyarakat umum diseluruh dunia. Dukungan bahan-bahan dari masyarakat datang melalui penjualan kartu ucapan, sumbangan perorangan, penghasilan dari peristiwa dan kegiatan amal (dari konser sampai pertandingan sepak bola), peristiwa-peristiwa dunia (*Sport Aid* dan *First Earth Run*), bantuan-bantuan hibah dari organisasi-organisasi yang dilakukan oleh anak-anak sekolah. Usaha-usaha pengumpulan dana seperi itu sering disponsori oleh Komite-komite Nasional. UNICEF terus berusaha meningkatkan pendanaan dari para donor tradisional maupun dari sumber-sumber potensial lainnya. Walaupun sumber keuangan sederhana sifatnya, UNICEF merupakan salah satu dari sumber kerjasama yang paling besar dalam pelayanan program-program yang bermanfaat untuk anak-anak di negara-negara berkembang. Namun, pengumpulan dana langsung hanya merupakan bagian bagian dari tujuan yang lebih luas untuk mendorong saham yang lebih besar dari sumber nasional dan internasional yang akan diarahkan kepada pelayanan-pelayanan untuk anak-anak di negara-negara ini. Dalam pengertian ini, dana yang sudah berjalan lama dan mantap yang berasal dari kemauan baik dan dukungan masyarakat di negara-negara industri, merupakan sumber untuk pengembangan dukungan promotif dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih berharga daripada pentingnya arti keuangan yang dimilikinya dan yang mungkin dicapainya.

## Hubungan UNICEF dengan Mitra Kerja Terkait Permasalahan Anak

Kerjasama UNICEF disusun bersama dengan pemerintah negara anggota yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas program yang akan dijalankan, baik secara langsung maupun melalui organisasi yang ditugaskan. Dukungan yang relatif lebih besar diberikan kepada program-program yang menguntungkan anak-anak dari negara-negara yang kurang berkembang. UNICEF selalu bekerjasama dengan sektor sukarela. Mereka bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan multi-nasional, perusahaan nasional dan usaha kecil menengah untuk mengidentifikasi, merancang dan mengimplementasikan aliansi yang memanfaatkan kekuatan dari sektor korporasi atas nama anak-anak di dunia. Banyak organisasi non pemerintah, seperti lembaga-lembaga profesional, bantuan pembangunan, pelayanan dan agama telah menjadi mitra kerja UNICEF dengan menyediakan saluran untuk dukungan promotif yang ditargetkan. Hal tersebut terjalin dengan mengumpulkan dan secara langsung terlibat dalam pelaksanaan program. Pada tingkat nasional dan daerah, peranan NGOs dalam program yang menguntungkan bagi anak-anak, telah meningkat dengan menekankan pada pelayanan untuk masyarakat didalamnya. Dalam situasi tertentu, NGOs dapat ditugaskan pemerintah bersangkutan untuk melaksanakan sebagian program kerjasama dengan UNICEF. Beberapa NGOs yang aktif dalam penanganan masalah anak-anak, yaitu *Amnestyn International,* *Anti Slavery international*, *Center for Europe's Children's Righ Information Network* (CRIN). [[12]](#footnote-12)

UNICEF adalah bagian dari suatu pola Hubungan Kerjasama yang mengkaitkan berbagai lembaga pembangunan PBB dan badan-badan pemberi bantuan bilateral dan NGOs dengan memperoleh dana dari berbagai sumber dan menciptakan berbagai keterampilan teknis dan operasional untuk memperkuat keefektifan suatu program yang ikut memanfaatkan dana yang ada pada UNICEF. Penyusunan program UNICEF yang sifatnya sangat disiplin ilmu ini menghendaki kerjasama yang erat kaitannya dalam koordinasi antar departemen di suatu Pemerintahan. Dalam hal ini kerjasama yang dijalin antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF guna mengatasi salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia yaitu menyangkut gizi buruk yang terjadi di beberapa provinsi khususnya di NTT. Kegiatan UNICEF dilakukan bersama dengan Pemerintah Indonesia guna melaksanakan dan bertanggung jawab atas program secara langsung ataupun melalui organisasi-organisasi yang ditugaskan pemerintah. Dukungan yang sangat besar diberikan kepada program-program yang menangani masalah anak-anak di Indonesia.

UNICEF menggunakan pengetahuan di tingkat masyarakat untuk mengembangangkan intervensi yang inovatif untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak dapat mengakses layanan dasar seperti air bersih, pengunjung kesehatan dan fasilitas pendidikan, dan bahwa layanan yang berkualitas tinggi. Pada saat yang sama, UNICEF menjangkau langsung ke keluarga untuk membantu mereka dalam memahami apa yang harus mereka lakukan untuk memastikan anak-anak mereka berkembang. UNICEF juga ingin mereka merasakan rasa kepemilikan layanan ini. Program UNICEF yaitu mencakup program kesehatan dan gizi, program air sanitasi dan lingkungan, program pendidikan, program penanggulangan HIV/AIDS, serta program perlindungan anak.

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNICEF guna mengatasi masalah- masalah yang terjadi di Indonesia serta membantu anak-anak yang menderita gizi buruk. UNICEF bertujuan untuk membantu mengatasi masalah gizi buruk yang terjadi di Inonesia, maka dari itu UNICEF pun bekerjasama dengan pemerintah agar tidak ada lagi masalah gizi buruk yang terjadi di Indonesia, khususnya di provinsi NTT. Kegiatan UNICEF dilakukan bersama dengan pemerintah Negara yang bersangkutan, melaksanakan dan bertanggung jawab atas program, secara langsung ataupun melalui organisasi-organisasi yang ditugaskan pemerintah. Dukungan yang sangat besar di berikan kepada program-program yang menangani anak-anak di Indonesia. Indonesia menandatangani program kerjasama senilai US$ 48 juta dengan *The United Nations Children's Fund* (UNICEF). Program yang diprioritaskan di empat provinsi ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para ibu dan anak-anak di Indonesia pada tahun 2010. Empat provinsi yang menjadi prioritas adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Wilayah tersebut diidentifikasi oleh Pemerintah dan PBB sebagai daerah yang memerlukan dukungan dalam percepatan proses pembangunan.[[13]](#footnote-13) Saat ini Indonesia melalui kebijakan dan alokasi anggaran menempatkan kelangsungan hidup dan pemenuhan hak-hak anak-anak dan ibu sebagai fokus prioritas pembangunan nasional. Tujuan kerjasama tersebut untuk membuat kebijakan lebih baik dan memperkuat sistem serta layanan sosial, termasuk menangani anak-anak kebutuhan khusus dan meningkatkan kesiagaan dalam kondisi darurat.

## Program UNICEF di Indonesia

UNICEF telah membantu Indonesia sejak tahun 1950 untuk memenuhi kebutuhan pokok anak-anak. Untuk masa 1990-1995 tujuan pokok kerjasama Pemerintah Indonesia - UNICEF adalah untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan pengembangan anak-anak dengan perhatian khusus pada percepatan penurunan tingkat kesakitan dan kematian bayi, anak dan wanita. Kerjasama meliputi program yang mempunyai dampak langsung pada kematian bayi dan anak-anak serta program yang mempersiapkan dan meningkatkan peran serta masyarakat. Program tersebut mencakup program pelayanan kesehatan terpadu (gizi, imunisasi, kesehatan ibu dan anak, serta penanggulangan penyakit diare), penyediaan air dan penyehatan lingkungan, pembangunan desa, pendidikan, pelayanan area dan kampung, serta pelayanan pendukung program. Program kerjasama menempatkan prioritas utama pada lima provinsi (Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur) dan sepuluh kota (Palembang, Medan, Padang, Bandung, Semarang, Pontianak, Banjarmasin, Surabaya, Probolinggo, dan Pasuruan) yang dipilih oleh Pemerintah dan UNICEF berdasarkan kriteria tingkat kematian bayi, tingkat buta huruf, angka harapan hidup dan pendapatan regional per kapita. Tujuh provinsi lainnya juga memperoleh bantuan untuk mendukung kegiatan pelayanan terpadu. Kesebelas provinsi itu mencakup 35% dari seluruh populasi anak di Indonesia atau kira-kira 18.200.000 anak di bawah usia lima tahun. Secara khusus UNICEF mendukung 29 proyek yang saling terkait yang kesemuanya sangat tergantung pada latihan dan pemanfaatan kader-kader desa. Dukungan juga diberikan kepada perluasan Nasional Usaha Perbaikan Gizi Keluarga dan Program Peningkatan Imunisasi.[[14]](#footnote-14)

Ruang lingkup UNICEF seputar menangani masalah anak dan berupaya untuk memberikan alternatif dan pengarahan terhadap masalah yang dihadapi oleh semua negara. Dalam mengatasi masalah anak, UNICEF membantu dengan cara memberikan nasihat dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha yang mendukung kesejahteraan anak. Selain memberikan nasihat dan bantuan, UNICEF bekerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan dari berbagai kalangan di masyarakat. Program UNICEF di Indonesia antara lain:[[15]](#footnote-15)

### Kesehatan dan Gizi

Sekalipun Indonesia berhasil mengurangi angka kematian bayi dan anak beberapa tahun terakhir, negeri ini masih menghadapi tantangan untuk mengurangi anak-anak kekurangan gizi dan memperbaiki kesehatan dan kematian ibu masih tinggi, yaitu sekitar 307 kematian dari tiap 100.000 orang. Kekurangan nutrisi mikro seperti misalnya yodium, vitamin A dan zat besi masih banyak terjadi. Terbukti 58 juta orang Indonesia tidak mengonsumsi garam beryodium. Sementara 70 persen ibu dan anak menderita anemia. Desentralisasi politis telah menyebabkan minimnya dana dan kemampuan pengelolaan layanan kesehatan di seluruh 33 provinsi dan 48 kabupaten. Tentu hal ini berdampak negatif terhadap bidang kesehatan terutama upaya imunisasi secara serentak di seluruh Indonesia. Imunisasi menunjukkan kemajuan sejak 1990an ketika jumlah anak usia 12-23 bulan mendapat imunisasi campak mencapai 72 persen. Tetapi cakupan imunisasi di Indonesia sangat bervariasi dan wabah campak pun tidak lazim. Selain itu kasus polio muncul pada tahun 2005 dengan 295 kasus dalam 9 bulan pertama. Hal ini merupakan pertama kalinya sejak 1996. Data dari lima Kabupaten beresiko tinggi terhadap tetanus pada bayi yang baru lahir dan ibu-ibu melahirkan. Sedangkan malaria berpengaruh pada sekitar 20 persen penduduk khususnya mereka di Indonesia timur. Dari 30 juta kasus malaria per tahun, hanya 10 persen yang ditangani dengan fasilitas kesehatan.

UNICEF sebagai organisasi yang memainkan peranan penting di Indonesia memusatkan proyek-proyek kesehatan dan gizi bagi kaum miskin dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Organisasi ini dipandang sebagai sumber keahlian teknis dan advokasi yang didanai secara internasional untuk menangani kesehatan anak. Sebagai mitra di tingkat internasional, organisasi ini juga membantu Pemerintah secara efektif di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten.

Program Kesehatan terhadap Gizi bekerjasama dengan Departemen Kesehatan terutama direktorat Kesehatan Masyarakat. Kesehatan Lingkungan dan Penyakit Menular. UNICEF memberi bantuan teknis pada program Pemerintah yang diprioritaskan secara maksimal. Misalnya lewat Kampanye Imunisasi dan pengembangan kemampuan manajemen kesehatan juga manjadi alternatif yang ditawarkan UNICEF. Bersama WHO dan Rotury International, UNICEF mendukung upaya Pemerintah untuk memberantas polio melalui Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang diadakan sekitar 34 juta anak diberi vaksin polio yang terjadi pada tahun 2005. Sementara itu, kesehatan ibu dan bayi lahir akan menjadi fokus UNICEF bersama Pemerintah, Disamping itu, pemberantasan cacingan, advokasi di pengembangan nutrisi mikro tambahan, gizi remaja, survei lain masyarakat.

### Pendidikan Dasar Untuk Semua

Dalam 20 tahun terakhir Indonesia telah mengalami kemajuan di bidang pendidikan dasar. Terbukti rasio bersih anak usia 7-12 tahun yang bersekolah mencapai 94 persen. Meskipun demikian, negeri ini masih menghadapi masalah pendidikan yang berkaitan dengan sistem yang tidak efisien dan kualitas yang sangat rendah. Terbukti, misalnya anak yang putus sekolah diperkirakan masih ada dua juta anak.

Indonesia tetap belum berhasil memberikan jaminan hak atas pendidikan bagi semua anak. Apalagi, masih banyak masalah yang harus dihadapi, seperti misalnya kualifikasi guru, metode pengajaran yang efektif, manajemen sekolah dan keterlibatan masyarakat. Sebagian besar anak usia 3 sampai 6 tahun kurang mendapat akses aktifitas pengembangan dan pembelajaran usia dini terutama anak-anak yang tinggal di pedalaman atau pedesaan.

Anak-anak Indonesia yang berada di daerah tertinggal dan terkena konflik harus belajar di bangunan sekolah yang rusak karena alokasi dan anggaran dari pemerintah daerah dan pusat tidak memadai. Metode ini masih mendominasi sekolah-sekolah di Indonesia. Ditambah lagi, anak-anak dari golongan ekonomi lemah tidak termotivasi dari pengalaman belajar di sekolah. Apalagi biaya pendidikan sudah relatif tidak terjangkau bagi mereka. UNICEF mendukung langkah-langkah Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan dasar melalui sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat. Sistem ini memungkinkan penelusuran semua anak di bawah 18 tahun yang tidak bersekolah.

Dalam upayanya mencapai tujuan pendidikan untuk semua pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia saat ini menekankan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun bagi seluruh anak Indonesia usia 6 tahun sampai 15 tahun. Dalam hal ini, UNICEF dan UNESCO memberi dukungan teknik dan dana. Bersama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan anak-anak di delapan propinsi di Indonesia, UNICEF mendukung program Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak (CLCC). Proyek ini berkembang pesat dari 1.326 sekolah pada 2004 menjadi 1.496 pada 2005. Kondisi ini membantu 45.454 guru dan menciptakan lingkungan belajar menantang bagi sekitar 275.078 siswa.

### Perlindungan Anak

Masih banyak anak-anak Indonesia yang rentan terhadap situasi kekerasan. Kondisi ini menjadi tantangan utama UNICEF dan mitra-mitra lokalnya. Ada beberapa fakta yang cukup memprihatinkan. Diperkirakan sekitar 60 persen anak balita Indonesia tidak memiliki akte kelahiran. Lebih dari 3 juta anak terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya. Bahkan, sekitar sepertiga pekerja seks komersil berumur kurang dari 18 tahun. Sementara 40.000-70.000 anak lainnya telah menjadi korban eksploitasi seksual. Ditambah lagi sekitar 10.000 wanita dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya. Belum lagi 5.000 anak yang ditahan atau dipenjara, dimana 84 persen di antaranya ditempatkan di penjara dewasa. Masalah lain yang tak kalah memprihatinkan adalah pelecehan terhadap anak terutama anak-anak dan wanita yang tinggal di daerah konflik atau daerah bekas bencana. Lebih dari 2.000 anak tidak mempunyai orang tua. Secara psikologis anak-anak itu terganggu.

Seperti hal nya anak-anak di belahan dunia lain, anak-anak di Indonesia pun mengalami kekerasan dalam rumah tangga, di jalanan, di sekolah dan diantara teman sebaya mereka. Tapi banyak kasus kekerasan semacam ini tidak terungkap. Atau, hal ini tidak dianggap sebagai kasus kekerasan karena kedua pihak tidak menganggapnya sebagai masalah. Seringkali kekerasan terhadap anak dianggap hal yang lumrah karena secara sosial dipandang sebagai cara pendisiplinan anak. Bahkan di banyak masyarakat norma sosial dan budaya tidak melindungi atau menghormati anak-anak. Kasus kekerasan di Indonesia tidak mencuat karena tidak ada laporan resmi. Hal ini terjadi karena lingkungan budaya yang sudah mengakar. Masyarakat tradisional memang tidak mengakui insiden semacam itu. Buruknya penegakan hukum dan korupsi di kalangan penegak hukum juga membuat kasus-kasus kekerasan terhadap anak pun bebas dari jeratan hukum. Sebagai lembaga internasional yang dikenal piawai dalam perlindungan anak, program-program UNICEF terfokus pada masalah-masalah pelanggaran kekerasan, eksploitasi anak dan pencatatan kelahiran.

Bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia, UNICEF merumuskan kebijakan-kebijakan perlindungan anak dan implementasi pengesahan anak secara hukum terutama anak yang tinggal di daerah konflik dan daerah bencana. UNICEF mendukung perkembangan dan implementasi perundang-undangan, kebijakan dan program di tingkat nasional maupun daerah seperti misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, Rencana Aksi Nasional terhadap Perdagangan Anak dan kebijakan nasional bagi anak-anak yang terpisah dari keluarganya.

Program Perlindungan Anak UNICEF juga bermitra dengan masyarakat madani, sektor swasta, aparat penegak hukum, wakil rakyat, pekerja sosial dan anak-anak dalam upaya menciptakan kerangka kerja yang komprehensif. Disamping itu, pencatatan kelahiran untuk semua juga digalakkan untuk mencegah pelanggaran, kekerasan dan eksploitasi terhadap anak-anak. Dalam hal ini, UNICEF mendukung pengembangan mekanisme pelaporan pelecehan terhadap anak-anak di enam kota besar di Indonesia dan penelitian-penelitian di kabupaten di Indonesia.

### Memerangi HIV/AIDS

Beberapa tahun belakangan, angka kasus HIV/AIDS meningkat tajam di seluruh Indonesia. Wabah ini terutama dipicu oleh para penyalahgunaan narkoba suntik dan para pekerja seks komersil. Akibatnya, resiko tertular anak muda di Indonesia menjadi semakin tinggi. Bahkan menurut perkiraan, menjelang 2010 sekitar 110.000 orang di Indonesia akan menderita atau meninggal karena AIDS. Sedangkan jutaan lainnya akan terjangkit HIV positif. Sementara itu prevalensi HIV di kalangan ibu hamil yang menjalani tes masih berada di bawah tiga persen. Sayangnya data untuk penduduk secara umum masih kurang. Kendala utamanya adalah stigma, diskriminasi dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Indonesia dalam waktu dekat akan beresiko di beberapa daerah di Indonesia menjadi salah satu indikator potensi kenaikan yang cukup mengkhawatirkan. Meningkatkan kesadaran pengetahuan mengenai penyakit menular ini melalui pendidikan advokasi masyarakat menjadi hal yang utama. Tujuannya untuk mencegah penyebaran epidemi ini lebih luas lagi. Kalau tidak, maka stigma, diskriminasi dan ketidaktahuan akan tetap menjadi kendala bagi upaya penanggulangan lebih jauh. Program HIV/AIDS bertujuan memberi pendidikan dan pencegahan bagi kaum muda dan masyarakat umum melalui berbagai cara. Misalnya melalui sekolah-sekolah, lembaga-lembaga keagamaan, klub-klub dan kelompok kepemudaan. Target utama pencegahan adalah perempuan dan pasangan mereka. Tujuan utama program UNICEF adalah untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang akan disampaikan melalui advokasi dan penyuluhan. Mereka yang peduli gender pun diharapkan tanggap terhadap upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS. Upaya pemberantasan HIV/AIDS dilakukan secara nasional dan menyeluruh melalui advokasi dialog kebijakan, mobilisasi sumberdaya, pengembangan material, jaminan mutu, pengawasan, dan evaluasi.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia dibantu UNICEF sudah mengambil langkah penting untuk mencegah dan mengurangi penuaran HIV di kalangan kaum muda, ibu hamil dan anak-anak yang rentan. Upaya pencegahan pun dilakukan pada kaum muda yang masih duduk di bangku sekolah maupun yang putus sekolah. Pemerintah memberikan program Pendidikan Keterampilan Hidup dan gerakan Pendidikan Sebaya yang menyoroti perilaku seks yang aman dan penggunaan kondom di kalangan kelompok yang beresiko. Dalam proyek ini guru juga mendapat pelatihan dan bantuan. Bersama pemerintah, UNICEF juga mengadakan program Pencegahan Penularan Ibu ke Anak yang menargetkan perempuan usia produktif pasangan mereka. UNICEF juga menjadi mitra pemerintah dalam program Kepedulian dan Dukungan terhadap Anak-anak dan advokasi dalam hal kepedulian dukungan bagi anak-anak yang rentan tertular HIV/AIDS.

### Air dan Kebersihan Lingkungan

Kondisi kebersihan air dan lingkungan di sebagian besar daerah di Indonesia masih sangat buruk. Situasi ini menyebabkan tingginya kerawanan anak terhadap penyakit yang ditularkan lewat air. Pada tahun 2003 hanya 50% penduduk Indonesia yang mengambil air sejauh lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran. Ukuran ini menjadi standar universal keamanan air. Di Jakarta misalnya, 84 persen air dari sumur-sumur dangkal ternyata terkontaminasi oleh *faecal coliform*, yaitu bakteri yang ditemukan di dalam tinja. Secara praktis masalah kebersihan menjadi tidak kondusif karena masyarakat memang selalu tidak sadar akan hal tersebut. Tempat pembuangan kotoran tidak dipergunakan dan dijaga dengan baik. Akibatnya masalah diare, penyakit kulit, penyakit usus dan penyakit yang disebabkan oleh air sering menyerang golongan keluarga ekonomi lemah. Upaya mengembangkan kesehatan anak secara umum pun menjadi terhambat. Fakta ini terjadi khususnya di daerah bencana tsunami Aceh dan Sumatra Utara.

Disamping akses air bersih yang buruk, situasi kebersihan air dan lingkungan diperparah oleh kegagalan penyluhan bagi masyarakat kelas bawah dan mereka yang tinggal di daerah kumuh untuk berprilaku bersih. Bahkan penyediaan air minum yang bersih pun belum secara serius dijadikan prioritas pembangunan di Indonesia terutama di tingkat provinsi. Pemerintah Indonesia dan UNICEF mengembangkan dan melaksanakan strategi perbaikan kondisi air minum dan kebersihan secara Nasional. Bantuan juga diberikan kepada Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki mekanisme perencanaan, sistem pengawasan dan database yang relevan, UNICEF juga memainkan peranan penting sebagai koordinator bidang kebersihan lingkungan dan air pasca bencana tsunami di Aceh dan Sumatra Utara. Membangun kemitraan kerja dan mempersatukan segala kemampuan dan sumber daya antar organisasi.

UNICEF beserta Pemerintah Indonesia juga memberi wawasan tentang air yang aman melalui program Pembangunan dan Kelangsungan Hidup anak. Anak akan belajar mengenai kebersihan air dan sekolah yang besahabat untuk anak-anak. Tujuannya untuk membantu memperbaiki pasokan air yang aman dan fasilitas kebersihan yang memadai di 30 kabupaten se-Indonesia. Gerakan ini mencakup rehabilitasi dan konstruksi sumur dangkal, tanki penampungan air hujan dan sistem pipa gravitasi. Pembangunan toilet, fasilitas mandi cuci dan pembuangan sampah di sekolah-sekolah di pusat kesehatan masyarakat dan di bangunan keagamaan.

Bersama mitra kerjanya, UNICEF juga menyediakan air minum beberapa saat sesudah gempa dan gelombang tsunami yang menghantam Aceh pada 26 Desember 2004. Setidaknya akses air bersih ini mencegah wabah penyakit kolera misalnya. UNICEF bersama WHO melakukan inspeksi pada 22 instalasi pengolahan air di seluruh daerah yang dilanda tsunami. Hasilnya, UNICEF menyediakan pompa air untuk instalasi pengolahan air di Lambaro di Banda Aceh. Pompa ini mampu membersihkan 11 juta galon air perhari. Selain itu, UNICEF juga menyediakan fasilitas air bersih dan pendidikan mengenai hidup bersih pada 170 sekolah yang mencakup 25.500 siswa di daerah timur Indonesia, Maluku pada tahun 2004 silam.

UNICEF merupakan suatu Organisasi Internasional di bawah naungan PBB yang dibentuk berdasarkan keprihatinan terhadap kondisi anak-anak pada saat itu, dan hendak memberikan perlindungan bagi anak-anak dan kaum perempuan di seluruh dunia yang paling membutuhkan pertolongan dalam krisis kemanusiaaan. Dengan mencermati program-program UNICEF di negara-negara di dunia, tujuan UNICEF adalah untuk mempromosikan kesetaraan hak-hak perempuan dan untuk mendukung mereka untuk berpartisipasi penuh dalam bidang politik, pembangunan dalam masyarakat tempat mereka hidup, sedangkan fungsi UNICEF sendiri yaitu memberikan arahan dan alternatif pemecahan masalah bagi negara-negara yang menghadapi masalah tentang anak, dan bekerjasama dengan patner internasional untuk memberikan bantuan eksternal bagi negara-negara yang membutuhkan bantuan. Serta melalui program UNICEF lainnya diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak-anak di seluruh dunia.

1. "What Do We Do: Changing The World With Children", dalam htpp://www.unicef.org/wide.index.html, diakses 4 April 2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional* (Bandung: Rafika Aditama, 1998), hlm.124 [↑](#footnote-ref-2)
3. ibid hlm.125 [↑](#footnote-ref-3)
4. ibid hlm 126 [↑](#footnote-ref-4)
5. Welcome to UNICEF :An Oriented Book, UNICEF, New York, 1990. [↑](#footnote-ref-5)
6. "Why We Do It" dalam www.unicef.org, diakses 10 April 2016 [↑](#footnote-ref-6)
7. Bunga Nur’afiifah Ramadhaniyah, “Peranan United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Menangani Anak-Anak Korban Konflik di Palestina. Skripsi”,diterbitkan, Program pascasarjana Universitas Pasundan, 2016 hlm.48 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid, hlm.52 [↑](#footnote-ref-8)
9. “Struktur organisasi UNICEF” dalam Bunga Nur’afiifah Ramadhaniyah, “Peranan United Nations Children’s Fund (UNICEF) Dalam Menangani Anak-Anak Korban Konflik di Palestina. Skripsi”,diterbitkan, Program pascasarjana Universitas Pasundan, 2016 hlm.53 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-10)
11. UNICEF: Literacy, Healt Nutrition and Income, 1983 [↑](#footnote-ref-11)
12. Bunga Nur’afiifah Ramadhaniyah, Op.Cit., hlm.63 [↑](#footnote-ref-12)
13. "Kerjasama Indonesia-UNICEF Senilai US$ 48 Juta" dalam http://news.liputan6.com/read/258675/kerja-sama-indonesia-unicef-senilai-us-48-juta, diakses 16 April 2017 [↑](#footnote-ref-13)
14. KegiatanUNICEF bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, organisasi-organisasi setempat, sektor swasta, dan masyarakat untuk melindungi hak-hak anak yang paling mendasar - dengan fokus utama pada mereka yang paling rentan. dalam https://www.unicef.org/indonesia/id/activities.html, diaskes pada 10 April 2017 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid [↑](#footnote-ref-15)